Pemerintah Kabupaten Karanganyar

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, serta terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Teknokratik Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, Renstra Dinas TErkait di Provinsi Jawa dan Renstra Kementerian terkait

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar telah

banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Karanganyar, 2020

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si.
NIP. 196405251989122001

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum..... I-4

1.3. Maksud dan Tujuan I-6

1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar II-1

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah II-5

2.2.1. Sumberdaya Manuasia (Pegawai) II-5

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset) II-6

2.3. Kinerja Pelayanan OPD..... II-32

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD II-78

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.....III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-5

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian RI III-11

3.4. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI III-14

3.5. Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah III-17

3.5.1. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah III-17

3.5.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah III-19

3.5.3. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah III-20

3.5.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah III-22
3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 ..... III-23
3.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III-25
3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis III-25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1. Tujuan IV-1
4.2. Sasaran IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1. Strategi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan V-1
5.2. Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
BAB VIII PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2020 ..... II-5

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2020 ..... II-5

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ..... II-6

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 – 2017 ..... II-10

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 ..... II-18

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah III-3

Tabel 3.2 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah III-9

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Berdasar Telaahan Renstra Kementerian III-13

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-15

Tabel 3.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah III-18

Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah III-20
Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-21
Tabel 3.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .. III-22
Tabel 3.9 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar Terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Karanganyar III-24
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan IV-3
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertnian, Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023 ..... V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota..... I-3

Gambar 1.2. Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan I-4

Gambar 2.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2017..... II-16

Gambar 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2017..... II-20

Gambar 2.3 Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (%)... II-21

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015..... II-22

Gambar 2.5 Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015..... II-23

Gambar 2.6 Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional..... II-23

Gambar 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional..... II-24

Gambar 2.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional..... II-24

Gambar 2.9 Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... II-26

Gambar 2.10 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... II-27
Gambar 2.11 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... II-28
Gambar 2.12 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... II-28
Gambar 2.13 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017..... II-29
Gambar 2.14 Grafik Gambaran Balita Stunting Tahun 2016-2018..... II-38
Gambar 2.15 Kualitas Air Sungai Ngringo Hulu dan Hilir II-52
Gambar 2.16 Kualitas Air Sungai Pengok Hulu dan Hilir II-52
Gambar 2.17 Persebaran Kualitas Air Sungai Kabupaten Karanganyar II-53
Gambar 2.18 Kondisi Kualitas Udara Ambien dari Beberapa Titik Sampel..... II-54
Gambar 3.1 Rata-Rata Proporsi Rata – rata Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017..... III-8
Gambar 4.1 Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023..... IV-11
Gambar 4.2 Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah IV-20
Gambar 6.1 Skema Pencapaian Visi..... VI-1
Gambar 6.2 Skema Kerangka Strategi dan arah Kebijakan Pencapaian Visi .. VI-3

Gambar 6.3 Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ..... VI-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stake holder*) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang teroganisir dan sistemtis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program , serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat , maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pergeseran paradigma itu menuntut terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian antara lain tuntutan diwujudkannya transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan seluruh kekuatan/*stakeholder* pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya petani di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pembangunan perlu dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar manjemen pembangunan yang professional, dengan mengintegrasikan seluruh kemampuan dan kepentingan dengan memperhatikan asas keterbukaan, partisipatif, keterpaduan, pemberdayaan, heterogenitas serta produktivitas.

Konsep dasar pembangunan pertanian dan pangan harus dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang mengimplementasikan konsep agribisnis secara utuh dan terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan dengan memanfaatkan berbagai kemampuan sumber daya yang ada.

Agar pembangunan dibidang Pertanian dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektifitas serta asas aksesbilitas aspirasi daerah, maka perlu disusun suatu RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar yang telah disusun mengharuskan Renstra Dinas disesuaikan dengan Perubahan RPJMD. Selain itu adanya perubahan nomenklatur Dinas juga harus dilakukan penyesuaian.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) pelaksanaan forum perangkat daerah; (5) penyusunan rancangan akhir; dan (6) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

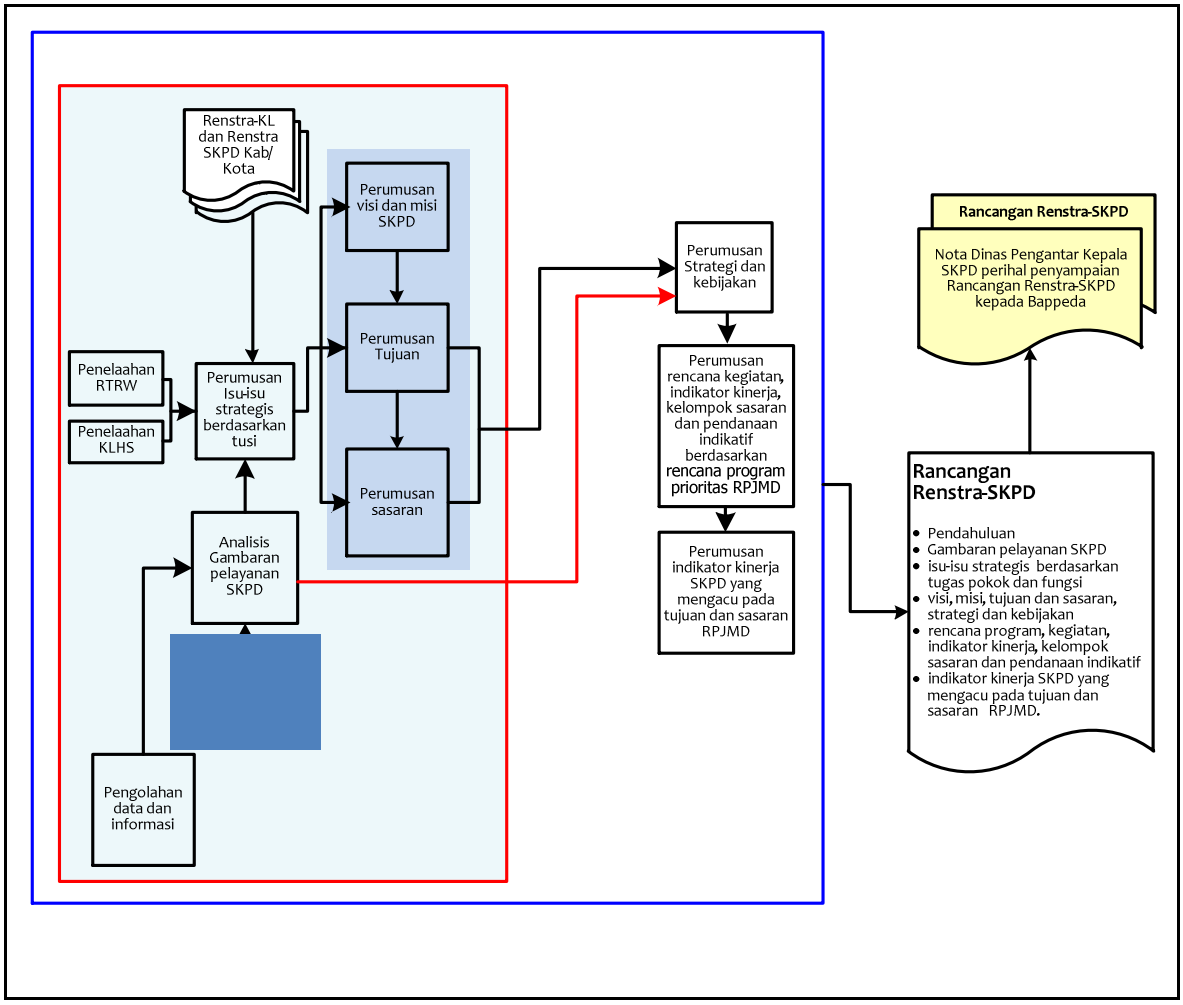

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2018-2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Selain itu dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

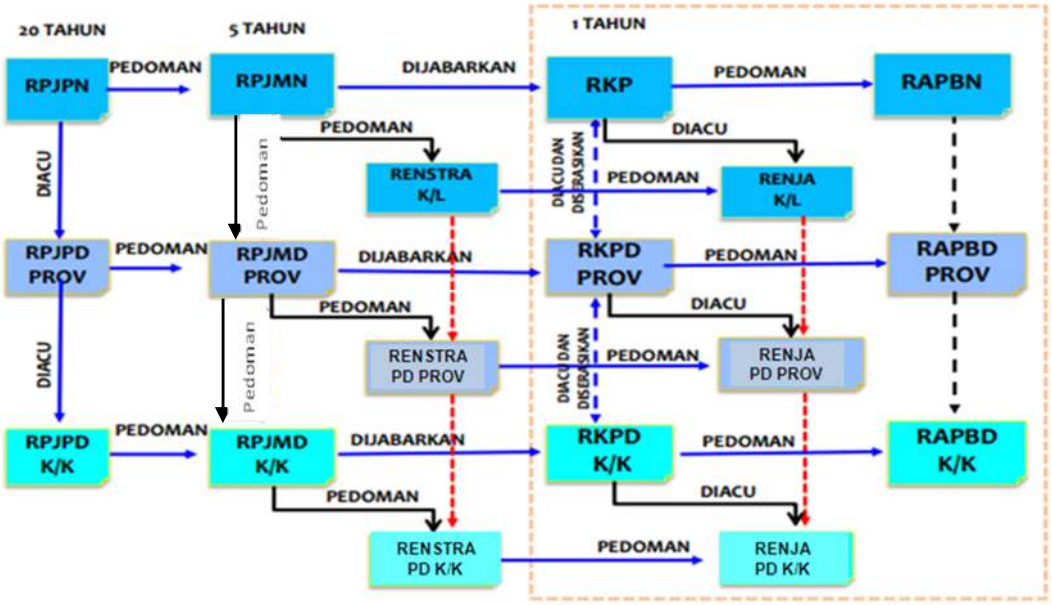

Gambar 1.2. Hubungan antara RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalm Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 tahun 2019 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018– 2023 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Sumber Daya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Karanganyar; Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Telaahan Renstra Dinas Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selama 5 lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan Indikator indikatif, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII.PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 tahun 2019 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Perencanaan
   2) Sub Bagian Keuangan, dan
   3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
   1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   2) Seksi Produksi
   3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
   1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   2) Seksi Produksi
   3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari :
   1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
   2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian; dan
   3) Seksi Penyuluhan
f. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
   1) Seksi Perbibitan dan Produksi;
   2) Seksi Kesehatan Hewan; dan
   3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
   1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

h. Bidang Perikanan, terdiri dari:
   1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perikanan; dan
   2) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
j. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian kegiatan,
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja,
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi,
4) Pengkoordinasian tata laksana,
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,
6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa,
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan
9) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

d. Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan;
3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;

3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang petemakan dan kesehatan hewan

Kepala Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang petemakan dan kesehatan hewan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang petemakan dan kesehatan hewan;
3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang petemakan dan kesehatan hewan; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

g. Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

h. Bidang Perikanan

Kepala Bidang Perikanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan

Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan;
3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan; dan
4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Seksi/Subbagian dan atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

j. Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dibentuk UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT yang ada adalah UPT Hortikultura dan UPT Balai Benih padi.

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Rekapitulasi data Pegawai berikut menggambarkan jumlah pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status kepegawaian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2020:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	22	5	17	3	47
3	D1	-	-	1	-	1
4	D3	4	1	12	1	18
5	S1	52	43	21	10	126
6	S2	11	14	1	-	26
7	S3	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	20	3	23
2	Golongan III	43	41	87
3	Golongan IV	23	19	42

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk mendukung pelaksaan tugas sehari-hari antara lain :

Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah
1	Alat pengangkat lainnya (dst)	2
2	Mesin Pembuat Pellet	4
3	Portable Generating Set	5
4	Pompa Air	25
5	Station Wagon	12
6	Pick Up	5
7	Sepeda Motor	129
8	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	2
9	Gerobak Dorong	14
10	Mesin Jahit Terpal	1
11	Air Blower	45
12	PH Meter (Alat Ukur Universal)	1
13	Global Positioning System	7
14	Telescope Tile Varieble	3
15	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	3
16	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	8
17	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	5
18	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	9
19	Alat Perontokan Mesin (Power Thresser)	9
20	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1
21	Lemari Penyimpan	2
22	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	163
23	Alat Pengukur Temperatur	4
24	Alat Pengambil Sample Tanah	6
25	Alat Prosesing lainnya	20
26	Alat Produksi Perikanan lainnya	11
27	Waight Band	5
28	Container	65
29	Insemination Gun	4
30	Termos A.J	4
31	Alat Pengolahan lainnya	42
32	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	17
33	Mesin Absen (Time Recorder)	1
34	Lemari Besi/Metal	40
35	Lemari Kayu	26
36	Rak Kayu/Besi	41

No	Nama Barang	Jumlah
37	Filing Cabinet Besi	60
38	Brandkas	9
39	Lemari Kaca	47
40	White Board	28
41	Peta	8
42	Alat Penghancur Kertas	4
43	Mesin Absensi	1
44	Overhead Projector	6
45	Papan Nama Instansi	18
46	Papan Tulis	5
47	Alat Kantor Lainnya	8
48	Meja Kerja Kayu	29
49	Kursi Kayu/Besi	248
50	Meja Rapat	86
51	Tempat Tidur Kayu	8
52	Meja Ketik dll	3
53	Meja 1/2 Biro	183
54	Kasur/Spring Bed	7
55	Kursi Rapat	230
56	Kursi Biasa	23
57	Kursi Lipat	344
58	Meja Komputer	6
59	Sofa	1
60	Meubeleur lainnya	9
61	Jam Listrik	1
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
63	Mesin Pemotong Rumput	7
64	Mesin Cuci	2
65	Alat Pembersih lainnya	2
66	Lemari Es	5
67	AC	19
68	Kipas Angin	43
69	Exhause Fan	1
70	Alat Pendingin lainnya	8
71	Kompor Gas & Alat Dapur	19
72	Televisi	11
73	Sound System, Wareless	39
74	Unit Power Supply	6
75	Stabilisator	2
76	Camera Video, Camera film, tustel	21
77	Timbangan Barang	6
78	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1
79	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43

No	Nama Barang	Jumlah
80	Tiang Bendera	1
81	Tangga Aluminium	2
82	Dispenser	5
83	Handy Cam	4
84	Alat Rumah Tangga Lain-lain	18
85	Alat Pemadam/Portable	18
86	Meja Kerja Pejabat Eselon II, III, IV	20
87	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	133
88	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2
89	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	7
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon III, IV	28
91	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	118
92	Kursi Kerja Pejabat lainnya	7
93	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
94	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	4
95	Audio Amplifier	3
96	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
97	Camera Electronic	10
98	Rak Peralatan	1
99	Camera Film	10
100	Layar Film/Projector	32
101	Mesin Jilid	21
102	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
103	Rollmeter	2
104	Telephone (PABX)	14
105	Intermediate Telephone/Key Telephone	1
106	Telephone Mobile	1
107	Handy Talky (HT)	11
108	Facsimile	6
109	Wireless Amplifier	1
110	Antene MF/MW Stationary	4
111	Alat Kedokteran umum lainnya	28
112	Timbangan Elektronik	2
113	alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan lainnya (dst)	8
114	Water Test	4
115	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	44
116	Analytical Balance Electric	3
117	Buret/Peralatan Titrasi	3
118	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	13
119	Fibertec System	36
120	alat laboratorium lain lainnya (dst)	65

No	Nama Barang	Jumlah
121	Gas Regulator	4
122	Pompa Peristaltik	4
123	COD Meter	1
124	Komputer Jaringan lainnya	1
125	P.C Unit	28
126	Lap Top	29
127	Note Book	77
128	Personal Komputer lainnya	1
129	Hard Disk	10
JUMLAH		3.318

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati Karanganyar dalam melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan kelautan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 tahun 2019 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2012 – 2017 urusan pertanian, pangan dan kelautan perikanan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 – 2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
URUSAN PANGAN							
Beras							
Ketersediaan	kg	165.803	214.017	168.873	188.404	202.330	197.127
Kebutuhan	kg	74.314	74.439	75.173	75.859	76.552	77.221
Jagung							
Ketersediaan	kg	28.239	17.107	20.799	23.415	21.726	16.109
Kebutuhan	kg	503	504	509	514	518	523
Kedelai							
Ketersediaan	kg	104	139	146	129	150	249
Kebutuhan	kg	16.574	16.602	166.765	16.918	17.073	17.222
SKOR PPH (POLA PANGAN HARAPAN)							
Padi-padian		20	22,2	22,4	22,2	20,1	18,7
Umbi-umbian		0,8	2,3	2,5	2,5	2,5	2,2
Pangan hewani		21,1	19,3	19,6	17,4	18,3	18,4
Minyak dan Lemak		5,0	4,2	4,4	5,0	5,0	5,0
Buah/biji berminyak		0,7	1	1,0	1,0	1,0	1,0
Kacang kacangan		10,0	8	10,0	10,0	2,5	9,6
Gula		1,6	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Sayur dan buah		28,1	28	30	25,3	27,6	30
Lain -lain		-	-	-	-	-	-

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
SKOR PPH KAB KARANGANYAR		87,8	87	92,3	85,9	87,2	87,1

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
URUSAN PERTANIAN							
Padi Sawah							
Luas	ha	46.356	46.054	46.088	48.131	53.466	52.991
Produksi	ton	279.061	357.978	261.137	311.920	337.925	331.781
Padi Gogo							
Luas	ha	480	423	583	816	469	-
Produksi	ton	2.755	2.230	3.090	5.180	2.615	-
Jagung							
Luas	ha	6.704	6.382	5.001	5.645	5.647	4.090
Produksi	ton	47.529	28.782	35.007	39.410	36.567	27.113
Kacang Tanah							
Luas	ha	5.050	4.233	3.506	4.348	3.661	1.533
Produksi	ton	6.009	9.607	4.558	6.680	4.935	2.266
Kedelai							
Luas	ha	132	173	153	128	128	230
Produksi	ton	175	234	245	217	252	419
Ubi Jalar							
Luas	ha	754	642	860	868	704	894
Produksi	ton	32.110	27.054	23.908	31.076	29.916	33.920
Ubi Kayu							
Luas	ha	5.127	4.892	4.324	4.005	2.830	2.589
Produksi	ton	108.825	115.689	127.990	131.244	91.478	83.113

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	ton/ha	6,02	7,77	5,67	6,48	7,07	6,26
Jagung	ton/ha	7,09	4,51	7,00	6,98	6,48	6,63
Kacang Tanah	ton/ha	1,19	2,27	1,30	1,54	1,35	1,48
Kedelai	ton/ha	1,33	1,35	1,60	1,70	1,97	1,82
Ubi Jalar	ton/ha	42,59	42,14	27,80	35,80	42,50	37,94
Ubi Kayu	ton/ha	21,23	23,65	29,60	32,77	32,32	32,10
Bawang Merah							
Luas	Ha	157	171	184	70	226	314
Produksi	Ton	1.583	968	1.583	2.088	1.987	2.787
Bawang Putih							
Luas	Ha	102	98	73	114	184	73
Produksi	Ton	1.595	1.145	984	1.618	2.565	800
Cabai Besar							
Luas	Ha	273	305	458	722	470	486
Produksi	Ton	1.208	992	1.435	2.376	2.403	2.610
Cabai Rawit							
Luas	Ha	-	-	-	-	-	183
Produksi	Ton	-	-	-	-	-	571
Tomat							
Luas	Ha	107	113	112	116	143	148
Produksi	Ton	907	1.139	969	633	1.917	1.681
Wortel							
Luas	Ha	942	829	694	-	436	519
Produksi	Ton	18.817	15.200	11.928	-	7.037	9.025
Kubis							

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Luas	Ha	194	345	290	-	226	257
Produksi	Ton	3.316	5.740	4.693	-	4.003	4.615
Alpukat							
Pohon	batang	33.040	12.659	24.599	26.049	72.131	9.886
Produksi	kw	9.776	6.382	14.776	22.465	19.248	11.025
Duku							
Pohon	batang	12.622	9.571	14.084	16.836	27.001	9.856
Produksi	kw	9.062	8.629	11.139	10.359	4.679	4.087
Durian							
Pohon	batang	81.040	51.736	70.873	52.946	198.457	56.870
Produksi	kw	53.560	32.352	39.487	26.477	21.369	45.141
Mangga							
Pohon	batang	280.687	273.200	272.068	80.124	284.278	84.564
Produksi	kw	666.362	436.366	275.473	48.304	48.874	76.597
Manggis							
Pohon	batang	15.109	11.721	12.032	2.551	16.185	33.554
Produksi	kw	1.768	2.660	2.577	731	1.943	4.277
Pisang							
Pohon	batang	346.242	127.293	416.747	138.813	272.975	104.109
Produksi	kw	75.396	77.878	60.938	69.847	74.740	82.698
Rambutan							
Pohon	batang	147.051	103.790	144.386	130.107	198.467	104.118
Produksi	kw	86.625	55.206	54.908	42.429	23.981	72.945
Cengkeh							
Luas		1.802	1.827	1.714	1.380	1.201	1.525
Produksi		686	97	267	347	142	119

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kelapa							
Luas		2.319	2.332	2.280	2.016	1.824	1.812
Produksi		1.656	1.693	1.341	1.193	1.068	1.102
Kopi							
Luas		43	43	41	41	35	35
Produksi		TBM	14	15	13	12,51	14
Tebu							
Luas		2.287	2.132	2.161	2.224	1.757	1.659
Produksi		8.559	9.387	8.743	9.793	6.804	9.313
Jahe							
Luas	Ha	55,15	-	172	172	-	166
Produksi	Ton	97,82	-	316,62	329,93	-	261,50
Kencur							
Luas	Ha	7,98	-	13,60	13,64	-	7,20
Produksi	Ton	62,73	-	134,83	184,83	-	51,65
Kunir							
Luas	Ha	37,76	-	57,39	61,96	-	45,42
Produksi	Ton	675,48	-	1.175,52	1.125,38	-	393,96
Kelompok Tani		987	1.043	1.056	1.098	1.125	1.172
Kelompok Wanita Tani		67	76	84	94	105	109
Gabungan Kelompok Tani		176	176	176	176	176	176
Balai Penyuluh Pertanian		17	17	17	17	17	17
POSLUHDES		176	176	176	176	176	176

URAIAN	SATUAN	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penyuluh Pertanian		81	74	66	59	52	43

No	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	**Perikanan**					
1	Perikanan Budidaya (Kg)	1.303.851	1.614.770	1.616.850	1.723.390	1.787.640
2	Perikanan Tangkap (Kg)	518.787	502.510	532.660	543.720	578.409
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	12,20	12,83	16,23	18,13	18,75
4	Jumlah Kelompok Binaan	15	25	37	114	117
II.	**Peternakan**					
1	Produksi					
	Daging (Kg)	6.434.733	6.618.491	7.019.350	7.416.400	7.721.979
	Sapi	1.995.300	2.171.340	2.507.400	2.634.840	2.616.840
	Kerbau	-	-	-	-	-
	Kambing	169.538	203.728	193.623	279.385	276.991
	Domba	270.164	235.205	304.834	252.228	223.880
	Babi	-	-	-	-	-
	Ayam Ras (Pedaging + Ras Petelur)	3.042.139	3.050.314	3.052.832	3.284.871	3.599.456
	Ayam Buras	915.908	916.213	916.382	916.458	947.530
	Itik	41.684	41.691	44.279	48.618	57.282
	Telur (Kg)	21.835.721	22.155.578	21.993.648	22.226.701	22.904.394
	Ayam Ras	19.967.740	20.208.390	19.973.954	20.211.162	20.789.349

No	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Ayam Buras	450.217	458.815	429.145	430.922	433.614
	Itik	549.533	585.976	604.786	590.173	683.946
	Puyuh	868.231	902.397	985.763	994.444	997.485
	Susu (Liter)	297.654	307.524	287.056	270.088	288.764
2	Kelahiran pedet (ekor)	9.898	9.421	8.807	9.002	9.181
3	Populasi (ekor)					
	Kuda	177	177	167	170	155
	Sapi Potong	61.612	62.948	63.144	63.716	64.763
	Sapi Perah	444	365	342	334	322
	Kerbau	226	203	122	123	113
	Kambing	24.451	24.600	25.330	25.581	27.006
	Domba	116.522	117.606	117.651	118.659	119.281
	Babi	53.526	51.021	52.145	51.755	51.789
	Ayam Buras	915.771	918.961	919.390	921.824	922.036
	Ayam Ras Petelur	1.870.718	1.830.060	1.830.430	1.849.548	1.911.134
	Ayam Ras Pedaging	5.296.550	4.758.900	6.948.766	6.978.175	6.981.975
	Itik	85.524	85.694	74.316	75.127	78.367
	Kelinci	12.801	12.985	12.268	12.465	12.585
	Puyuh	500.350	511.427	511.485	513.466	517.149
4	Tingkat Kematian Ternak (%)					
	Ternak besar	0,00006	0,00006	0,00005	0,00004	0,00006
	Ternak Kecil	0,00007	0,00007	0,00006	0,00005	0,00005
	Unggas	0,00009	0,00008	0,00008	0,00007	0,00007
	Aneka Ternak	0,0002	0,0002	0,0003	0,0002	0,0002

No	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah Kelompok Binaan	26	46	86	222	317

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018

NO`	PROGRAM	ANGGARAN (000)					REALISASI (000)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA RATA PERTAMBAHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2.015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	300.605	357.595	326.040	441.086	515.120	296.890	284.712	312.547	416.368	476.407	98,76	79,62	95,86	94,40	92,48		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.108	161.400	112.900	202.643	178.000	168.467	73.356	99.390	186.310	165.814	98,46	45,45	88,03	91,94	93,15	7,90	13,87
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159.540	229.500	11.900	-	2.000	154.770	221.479	10.923	-	2.000	97,01	96,51			100,00	(50,32)	(50,66)
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	129.219	153.757	131.100	161.940	247.550	116.644	128.407	102.500	145.548	239.900	90,27	83,51	78,18	89,88	96,91	20,16	24,18
E	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	355.000	684.250	710.000	255.075	365.500	323.521	601.782	690.475	238.243	356.900	91,13	87,95		93,40	97,65	18,93	21,26
F	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.288.911	3.649.250	545.400	1.438.000	1.267.150	1.229.216	3.270.112	538.511	1.394.854	1.210.876	95,37	89,61	98,74	97,00	95,56	62,46	57,08
G	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	255.000	130.000	80.000	103.500	165.000	246.653	64.922	53.405	93.483	162.530	96,73	49,94	66,76	90,32	98,50	0,33	14,37
H	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	130.000	140.000	-	89.650	50.000	121.795	130.424	-	85.072	48.598	93,69	93,16		94,89	97,20	(45,51)	(45,26)
I	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	14.880.260	22.785.932	1.552.840	7.914.257	4.560.450	9.292.738	17.786.529	1.257.113	7.576.586	4.505.855	62,45	78,06	80,96	95,73	98,80	81,81	115,16
J	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	-	-	-	457.700	153.750	-	-	-	290.192	139.275					90,59	(66,41)	(52,01)
K	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	280.000	409.600	50.000	-	-	272.150	374.945	49.650	-	-	97,20	91,54				(47,17)	(49,66)
L	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.097.818	1.418.433	231.490	-	-	1.057.814	424.828	223.161	-	-	96,36	29,95				(51,49)	(69,10)
M	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	54.325	30.000	30.000	-	-	37.878	29.425	25.454	-	-	69,72	98,08				(48,26)	(45,27)

NO`	PROGRAM	ANGGARAN (000)					REALISASI (000)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA RATA PERTAMBAHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2.015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
N	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	48.729					97,46		
O	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	70.925					94,57		
P	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.969.655	2.172.478	480.455	1.615.085	1.503.405	1.932.321	2.005.377	472.630	1.450.703	1.281.734	98,10	92,31	98,37	89,82	85,26	40,41	30,66
Q	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	-	44.500	46.570	75.000	12.000	-	17.855	44.250	74.673	11.975		40,12	95,02	99,56	99,79	-6,10	44,21
R	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	50.000	96.425	20.000	-	-	47.580	95.510	-	-		95,16	99,05			-28,80	0,37
S	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	125.000	100.000	480.250	113.470	85.000	123.368	98.880	449.112	104.592	80.891	98,69	98,88	93,52	92,18	95,17	64,70	58,74
T	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.357.738	1.100.281	1.233.250	896.650	587.600	1.315.817	1.071.631	1.173.621	893.109	570.656	96,91	97,40	95,16	99,61	97,12	-17,16	-17,26
U	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	48.679					97,36		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut

1. Tingginya tingkat konsumsi beras pada masyarakat,
2. Konsumsi pangan non beras masih rendah,
3. Ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi pertanian
4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang tidak maksimal dari petani,
5. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga terjadi pergeseran musim tanam, masa pemanenen yang tidak merata sepanjang tahun,
6. Upaya penguatan cadangan pangan masyarakat belum maksimal
7. Pencapaian skor pangan harapan belum maksimal
8. Peningkatan diversifikasi pangan belum maksimal
9. Peningkatan pemberdayaan lembaga penyuluh belum maksimal
10. Peningkatan kemandirian lembaga petani belum maksimal
11. Terbatasnya sumber daya air
12. Kerusakan lingkungan mempengaruhi debit waduk
13. Perubahan Iklim yang mempengaruhi curah hujan
14. Bencana alam banjir dan longsor
15. Kurangnya lahan dalam penyediaan pakan

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Peluang Pengembangan Pelayanan OPD adalah sebagai berikut

1. Memberikan bantuan alsin pertanian ke petani
2. Diadakan sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan non beras
3. Mengembangkan potensi dan produk unggulan daerah berbasis umbi - umbian dan menjamin ketersediaan pasar stabilitas harga untuk penjualan produk - produk pengolahan hasil pertanian
4. RDKK (Rencana Defenitif Kegiatan Kelompok) dijadwalkan lebih awal dan terinci dan mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu.
5. Sosialisasi penanganan hasil panen dan pengemasan hasil - hasil pertanian
6. Menyediakan pasar untuk penjualan hasil - hasil pertanian .
7. Mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana irigasi seperti bantuan pompa air, memperbanyak bangunan sumur

resapan dan irigasi air dangkal, serta meningkatkan jumlah pembangunan embung

8. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi yang rusak, baik JITUT, JIDES, Embung dan saluran - saluran irigasi.
9. Sosialisasi pengolahan hasil - hasil perkebunan.
10. Pengembangan desa mandiri pangan
11. Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi
12. Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari
13. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
14. Peningkatan kemampuan lembaga petani
15. Besarnya potensi sumberdaya perikanan dan peternakan yang dapat dikembangkan
16. Tersedianya balai pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM perikanan (Contoh : BPPI-Tegal, BPPAP-Jepara, BPPAT-Sukabumi).
17. Adanya sumber-sumber pendanaan dari swadaya masyarakat dan CSR.
18. Adanya peringatan hari ikan nasional.
19. Banyaknya pedagang pengecer yang memasarkan hasil perikanan.
20. Adanya lembaga yang menangani perijinan usaha perikanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan *problem solving*. Metode yang digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Internal OPD dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Berikut permasalahan yang ada di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan ;

a. Permasalahan terkait kesekretariatan

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
3) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dan pangan
4) Masih kurangnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan dan aset maupun pelaksana di lapangan
5) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar..

b. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tujuan umum pembangunan pertanian dan pangan adalah peningkatan dan pemerataan dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani. Berikut merupakan permasalahan yang ada dalam mewujudkan itu semua ::

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
2. Belum optimalnya penguasaan teknologi dalam pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura
3. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian
4. Semakin berkurangnya tenega kerja di bidang pertanian dan rendahnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian,

Bidang Perkebunan

1. Belum optimalnya produksi perkebunan
2. Masih kurangnya teknologi dalam peningkatan hasil produksi
3. Masih ditemukannya hama penggangu pertumbuhan tanaman perkebunan

Bidang Ketahanan Pangan

1. Skor pola pangan harapan belum optimal
2. Pemanfaatan pekarangan belum maksimal
3. Pengembangan B2SA belum optimal

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh,
2. Masih rendahnya kualitas SDM petani,

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemerataan dalam Pemenuhan kebutuhan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian	1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pangan masyarakat	di Kabupaten Karanganyar 2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Masih lemahnya kelembagaan petani 5. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. 6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	2. Belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional 3. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani 4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh 5. Masih rendahnya kualitas SDM petani 6. Masih rendahnya akses permodalan dan pemasaran petani 7. Semakin berkurangnya tenega kerja di bidang pertanian dan rendahnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak terlepas dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Terpilih.

Visi:

"**Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indnesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatakan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *govermance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih

terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.

c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur "maju' mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. **Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

   Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. **Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

   Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat komplek. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh,

modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. **Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

   Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. **Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

   Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

   Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kokoh. untuk meningkatnya

produktivitas di Bidang Industri Pertanian Pariwisata dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan perikanan serta untuk Meningkatnya swasembada untuk ketahanan pangan dengan indikator eningkatan produksi pangan (ton) Peningkatan produksi tanaman hortikultura (kw) Peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton) dan Skor pola pangan harapan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Misi**: Pemberdayaan Perekonomian Rakyat	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian 2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Masih lemahnya kelembagaan petani 5. Belum optimalnya	1. Alih fungsi lahan 2. Anomali Iklim 3. Serangan OPT 4. Belum tercukupinya kebutuhan benih yang berkualitas 5. Terbatasnya Sarana Prasarana pendukung 6. Rendahnya kualitas SDM petani 7. Menurunnya minat generasi muda bekerja di bidang pertanian	• Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas • Peningkatan kualitas SDM pelaku pertanian • Kemajuan teknologi pendukung pertanian dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna • Adanya lembaga/
2	**Tujuan:** Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	**Sasaran:** Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan	pelayanan kepada masyarakat 6. Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang (PPH). 7. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.		institusi pertanian • Potensi lahan untuk pengembangan pertanian • Fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pertanian RI

Dalam rangka memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Kementrian Pertanian 2015-2019. Visi Kementrian Pertanian adalah:

" Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan
Yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat
dan Produk Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis Sumberdaya Lokal
Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani."

Sedangkan Misi Kementrian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan,
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan,
3. Mewujudkan kesejahteraan petani, dan
4. Mewujudkan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian,
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi,
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan (2015-2019) dalam membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target utama yaitu:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula,
2. Peningkatan diversifikasi pangan,
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan subtitusi impor,
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi,
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani,
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementrain Pertanian RI Tahun 2015-2019, sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Kementerian

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, Peningkatan diversifikasi pangan, Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan subtitusi impor, Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, Peningkatan pendapatan keluarga petani, Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. .	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian 2. infrastruktur dan sarana prasarana pertanian masih terbatas 3. Rendahnya kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Alih Fungsi Lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi 5. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil 6. Pengelolaan lahan yang tidak optimal 7. Pengolahan pasca panen masih rendah 8. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Konversi lahan yang tidak terkendali, 2. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, 3. Penurunan kualitas lahan, 4. Rata-rata kepemilikan lahan sempit, 5. Ketidakpastian status kepemilikan lahan, 6. Daya dukung irigasi bagi pertanianbelum optimal, 7. Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, 8. Kurangnya regulasi pembangunan pertanian, 9. Kemampuan permodalan petani terbatas, 10. Lemahnya kelembagaan petani,	a. Keragaman hayati dan agroekosistem, b. Lahan pertanian yang luas, c. Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat, d. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura e. Ketersediaan sumber daya pertanian f. Produksi dan produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan g. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian h. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			11. Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi, 12. Menurunnya minat generasi muda.	

3.4 Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai Wujud Kontribusi Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah dengan sasaran Terwujudnya peningkatan produksi Pertanian dan perkebunan

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah			
1.	Terwujudnya peningkatan produksi Pertanian dan perkebunan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian 2. infrastruktur dan sarana	1. Konversi lahan yang tidak terkendali, 2. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru,	a. Keragaman hayati dan agroekosistem, b. Lahan pertanian yang luas, c. Teknologi pertanian yang

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		prasarana pertanian masih terbatas 3. Rendahnya kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Alih Fungsi Lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi 5. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil 6. Pengelolaan lahan yang tidak optimal 7. Pengolahan pasca panen masih rendah	3. Penurunan kualitas lahan, 4. Rata-rata kepemilikan lahan sempit, 5. Ketidakpastian status kepemilikan lahan, 6. Daya dukung irigasi bagi pertanianbelum optimal, 7. Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, 8. Kurangnya regulasi pembangunan pertanian, 9. Kemampuan permodalan petani terbatas, 10. Lemahnya kelembagaan petani, 11. Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi, 12. Menurunnya minat generasi muda.	berkembang dengan pesat, d. Kewenangan dinas dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura e. Ketersediaan sumber daya pertanian f. Produksi dan produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan g. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian h. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan pertanian

3.4.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas KEtahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasar Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dinas Ketahanan Pangan			
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. Skor pola pangan harapan belum optimal 2. Pemanfaatan pekarangan belum maksimal	Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat.	• Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya diversifikasi pangan

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Pengembangan B2SA belum optimal		• Keanegaragaman olahan pangan berbahan dasar non beras

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Berdasarkan Perda no 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 22.477 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas 12.927 Ha. Pawasan perkebunan seluas kurang lebih 6.351 Ha,

Strategi pemantapan kawasan pertanian terpadu meliputi :

a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
b. menjaga intensitas tanam dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;
c. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
e. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
f. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan
g. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Karanganyar

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Pertanian	a. Implementasi pruntukan wilayah untuk pertanian belum maksimal	a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat b. Kebutuhan lahan untuk perumahan semakin meningkat c. Kurangnya penagakan perda RTRW	a. Kebutuhan penuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan pengembangan pertanian berbasis kawasan c. Perda LP2B sedang dalam proses penyusunan

3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2018-2023 tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar.

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang meliputi analisa renstra Kementerian Pertanian RI, analisa Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian
3. Masih lemahnya kelembagaan petani;
4. Belum optimalnya skor pola pangan harapan
5. Belum optimalya cadangan pangan utama
6. Belum optimalnya kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian dan pangan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Berikut sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya produksi pertanian
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Meningkatnya ketersediaan Pangan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian			Target Kinerja			Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan		Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	13,51	12,90	13,26	13,51	13,52	13,53	13,53
			Pola Pangan Harapan	skor	84,3	85,3	83,1	87,8	88,3	89,3	89,3
		Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan	ton	472.841	473.937	474.870	475.809	476.791	477.849	477.849
			Produktivitas pertanian tanaman pangan	Kw/Ha	65,08	60,44	60,44	61	62	63	63
			Produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Ton/Ha	8,15	10,19	10,19	11	12	13	13
			Produktivitas pertanian perkebunan	Ton/Ha	0,58	0,61	0,61	0,64	0,67	0,70	0,70
			Produksi daging	kg	7.721.978	8.065.887	7.772.525	5.646.121	5.928.427	6.224.848	6.224.848
			Produksi telur	kg	22.913.394	23.269.510	22.762.730	16.288.657	17.103.090	17.958.244	17.958.244
			Produksi susu	liter	288.764	266.826	221.256	222.362	223.473	224.590	224.590
		Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	kg	484.345	441.069	490.522	491.854	492.311	493.858	493.858

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian			Target Kinerja			Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan	kg	2.366.049	2.398.691	2.353.549	2.386.086	2.419.294	2.452.973	2.452.973
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	BB	BB	BB
			Nilai IKM	skor	B	B	B	B	B	B	B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan utama dan hortikultura melalui :
    a. Penyediaan benih dan bibit unggul
    b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi
    c. Pengembangan kawasan OVOP
    d. Pengendalian dan pencegahan OPT
    e. Pengembangan sumber daya manusia pertanian
2. Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian
    a. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi
    b. Penyediaan alat dan mesin pertanian
    c. Optimasi lahan
    d. Penerapan teknologi pertanian'
    e. Penyediaan pupuk
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui :
    a. Peningkatan kemampuan lembaga petani
    b. Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan
    c. Promosi produk unggulan daerah
    d. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh
4. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan.
    a. Diversifikasi pangan di tingkat masyarakat.
    b. penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat.
    c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan di tingkat masyarakat
    d. Pemanfaatan pekarangan dalam penguatan ketersediaan pangan
    e. Peningkatan kualitas pangan pangan segar
    f. Penguatan lumbung pangan

5. Meningkatkan produksi perikanan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarpras perikanan, penggunaan teknologi tepat guna
    a. Pelatihan dan pendampingan pelaku budidaya perikanan
    b. Penyediaan sarana dan prasaranan budidaya perikanan
    c. Penyediaan bibit perikanan
6. Meningkatkan kinerja pegawai
    a. Penyediaan administrasi perkantoran
    b. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur
    c. Peningkatan disiplin aparatur
    d. Peningkatan kapasitas aparatur

5.2 Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Kebijakan pembangunan pertanian, pangan dan perikanan di Kabupaten Karanganyar diarahkan pada :

1. Peningkatan hasil produksi pertanian dengan prioritas tanaman pangan utama
2. Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan air irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian
3. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani
4. Mendorong ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah diprioritaskan pada daerah yang berpotensi rawan pangan (rawan pangan transien dan rawan pangan kronis).
5. Peningkatan hasil perikanan dengan prioritas perbaikan sapras perikanan.
6. Penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan
7. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertnian, Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, ketahanan pangan dan produksi perikanan	Meningkatnya produksi pertanian	1. Meningkatkan produksi tanaman pangan utama dan hortikultura 2. Meningkatkan infrastruktur dan saran pertanian 3. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Peningkatan hasil produksi pertanian dengan prioritas tanaman pangan utama 2. Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan air irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin pertanian 3. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani
	Meningkatnya Ketersediaan pangan	4. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	4. Mendorong ketahanan pangan masyarakat dan pemerintah diprioritaskan pada daerah yang berpotensi rawan pangan (rawan pangan transien dan rawan pangan kronis).
	Meningkatnya Produksi Perikanan	5. Meningkatkan produksi perikanan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarpras perikanan, penggunaan teknologi tepat guna	5. Peningkatan hasil perikanan dengan prioritas perbaikan sapras perikanan. 6. Penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan
	Meningkatnya Akuntabilitas	6. Meningkatkan kinerja pegawai	7. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Perangkat Daerah		daya aparatur pemerintah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program untuk tahun 2018 – 2023 kedepan penyusunan program pembangunan pertanian dan pangan Kabupaten Karanganyar, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar serta sesuai dengan Misi 2 Kabupaten Karanganyar yaitu *"Pemberdayaan Perekonomian Rakyat"*. Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2018 - 2023 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mencanangkan Program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan perkonomian melalui pengembangan potensi lokal sebagai produk unggulan dibidang pertanian, pangan dan perikanan.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

A. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
   1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
   2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
   3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
   4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
   5) (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
   6) Pengolahan Data Retribusi Daerah
   7) (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
   8) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
   9) (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
   10) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
   1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Pemindahan Tugas ASN
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan/Material
8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

g. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Alat Besar
4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Pengadaan Mebel
6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Pengadaan Aset Tak Berwujud
9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Pemeliharaan Mebel
6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

a. **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.
1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
3) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
4) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka**

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
3) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

b. **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

c. **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2) Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal
3) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
4) Pekarangan pangan lestari
5) Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal
6) Monitoring dan Evaluasi Konsumsi Pangan

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

b. **Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota.** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
2) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengembangan Kapasitas pembudidaya ikan kecil

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman
2) Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman

c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
2) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
6) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)

5. Program Penyuluhan Pertanian

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut.

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
4) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.**

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

(Terlampir)

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**788,000,000**		**957,400,000**		**1,004,020,000**		**2,749,420,000**
2	**09**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**% lumbung pangan aktif**	**%**	**47.82**	**56.52**	**500,000,000**	**60.87**	**550,000,000**	**65.22**	**576,250,000**	**65.22**	**1,626,250,000**
2	**09**	**02**	**2.01**			**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah infrastruktur sarana prasarana pangan sesuai untuk penyimpangan cadangan pangan**			**4 unit**	**500,000,000**	**4 unit**	**550,000,000**	**4 unit**	**576,250,000**	**4 unit**	**1,626,250,000**
2	09	02	2.01	01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Lumbung pangan			1 unit	150,000,000	1 unit	157,500,000	1 unit	165,375,000	1 unit	**472,875,000**
2	09	02	2.01	02		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Lantai jemur			1 unit	50,000,000	1 unit	52,500,000	1 unit	55,125,000	1 unit	**157,625,000**
2	09	02	2.01	03		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rumah RMU dan RMU			2 unit	300,000,000	2 unit	315,000,000	2 unit	330,750,000	2 unit	**945,750,000**
2	09	02	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Bintek pengelola lumbung pangan			2 kali	-	2 kali	25,000,000	2 kali	25,000,000	2 kali	**25,000,000**
2	**09**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Konsumsi Energi (AKE); Angka Konsumsi Protein (AKP) dan Indeks Ketahanan Pangan**	**AKE: kalori/ kapita/ tahun; AKP: gram/ kapita/ tahun ; IKP: Indeks**	**AKE: 1825kalori/ kapita/ tahun; AKP: 50,8 gram/ kapita/ tahun ; IKP: 86,2**	**AKE: 1851,4 kalori/ kapita/ tahun; AKP: 51,0 gram/ kapita/ tahun ; IKP: 86,4**	**250,000,000**	**AKE: 1861,0 kalori/ kapita/ tahun; AKP: 51,25 gram/ kapita/tahun; IKP: 86,66**	**327,500,000**	**AKE: 1870,5 kalori/ kapita/ tahun; AKP: 51,5 gram/ kapita/ tahun; IKP: 87,16**	**343,875,000**	**AKE: 1870,5 kalori/ kapita/ tahun; AKP: 51,5 gram/ kapita/ tahun; IKP: 87,16**	**343,875,000**
2	**09**	**03**	**2.01**			**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah pangan pokok dan pangan lainnya yang disalurkan**			**12 komoditas**	**10,000,000**	**12 komoditas**	**30,500,000**	**12 komoditas**	**32,025,000**	**12 komoditas**	**32,025,000**
2	09	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Informasi Harga Pasar				-	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	**10,500,000**
2	09	03	2.01	04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan stok dan pasokan pangan			12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,500,000	12 bulan	11,025,000	12 bulan	**11,025,000**
2	09	03	2.01	06		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah LDPM yang dibina				-	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	10,500,000	1 kelompok	**10,500,000**
																	-
2	**09**	**03**	**2.02**			**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah cadangan pangan Kabupaten yang disediakan**			**21,5 ton**	**50,000,000**	**21,5 ton**	**97,500,000**	**21,5 ton**	**102,375,000**	**21,5 ton**	**102,375,000**
2	09	03	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten				-	1 kali	25,000,000	1 kali	26,250,000	1 kali	**26,250,000**
2	09	03	2.02	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Data ketersediaan pangan dan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP)				-	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	21,000,000	2 dokumen	**21,000,000**
2	09	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Gabah untuk cadangan pangan			7,5 ton	50,000,000	14 ton	52,500,000	14 ton	55,125,000	14 ton	**55,125,000**
																	-
2	**09**	**03**	**2.04**			**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi**			**3 kegiatan**	**190,000,000**	**3 kegiatan**	**199,500,000**	**3 kegiatan**	**209,475,000**	**3 kegiatan**	**209,475,000**
2	09	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					190,000,000		199,500,000		209,475,000		**209,475,000**
						Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal	Jumlah even peringatan hari pangan yang diikuti			1 kali	10,000,000	1 kali	10,500,000	1 kali	11,025,000	1 kali	**11,025,000**
						Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah kelompok yang dibina dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Lomba Optimasi Pemanfaatan Pekarangan			17 Kecamatan	15,000,000	17 Kecamatan	15,750,000	17 Kecamatan	16,537,500	17 Kecamatan	**16,537,500**
						Pekarangan pangan lestari					140,000,000		147,000,000		154,350,000		**154,350,000**
						Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal	Lomba Cipta Menu Pangan Berbahan Baku Lokal tingkat Kabupaten, Keikutsertaan lomba cipta pangan tingkat Propinsi di TMII; festival olahan pangan lokal			3 Kali	25,000,000	3 Kali	26,250,000	3 Kali	27,562,500	3 Kali	**27,562,500**
						Monitoring dan Evaluasi Konsumsi Pangan	Jumlah monev yang dilaksanakan			2 kali	-		-		-		-
2	**09**	**04**				**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prosentase desa rawan pangan**	**%**	**29.37%**	**28.81%**	**30,000,000**	**26.55%**	**61,500,000**	**24.29%**	**64,575,000**	**24.29%**	**156,075,000**
2	**09**	**04**	**2.01**			**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**			**1 dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**30,000,000**	**1 dokumen**	**31,500,000**	**1 dokumen**	**31,500,000**
2	09	04	2.01	01		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	31,500,000	1 dokumen	**31,500,000**
2	**09**	**04**	**2.02**			**Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah desa rawan pangan yang ditangani**			**4 desa**	**30,000,000**	**4 desa**	**31,500,000**	**4 desa**	**33,075,000**	**4 desa**	**33,075,000**
2	09	04	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Data analisa SKPG			12 bulan	30,000,000	12 bulan	31,500,000	12 bulan	33,075,000	12 bulan	**33,075,000**
2	09	04	2.02	02		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani				0	4 desa	-	4 desa	-	4 desa	-
2	**09**	**05**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Jumlah pangan segar yang diuji**	**komoditas; pasar**	**12 bulan**	**12 bulan**	**8,000,000**	**12 bulan**	**18,400,000**	**12 bulan**	**19,320,000**	**12 bulan**	**19,320,000**

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	**09**	**05**	**2.01**			**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pangan segar yang diawasi**			**4 pasar**	**8,000,000**	**4 pasar**	**18,400,000**	**4 pasar**	**19,320,000**		**19,320,000**
2	09	05	2.01	01		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi			1 kali	5,000,000	1 kali	5,250,000	1 kali	5,512,500	Kab Karanganyar	**5,512,500**
2	09	05	2.01	02		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang disertifikasi				-	2 kelompok	10,000,000	2 kelompok	10,500,000	Kab Karanganyar	**10,500,000**
2	09	05	2.01	05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengujian mutu dan keamanan pangan			4 kali	3,000,000	4 kali	3,150,000	4 kali	3,307,500	Kab Karanganyar	**3,307,500**
																	-
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**1,275,950,000**		**1,373,997,500**		**1,442,197,375**		**3,985,894,875**
3	**25**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**Kg**	**511,673**	**516,790**	**15,000,000**	**521,958**	**40,000,000**	**527,177**	**42,000,000**	**527,177**	**42,000,000**
3	**25**	**02**	**2:01**			**Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah waduk, sungai dan genangan air lainnya yang dikembangkan dalam pengelolaan perikanan tangkap**	**Lokasi**	**6**	**6**	**15,000,000**	**6**	**40,000,000**	**6**	**42,000,000**	**6**	**42,000,000**
3	25	02	2:01	03		Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap					15,000,000		40,000,000		42,000,000		**42,000,000**
						Fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	Jenis	1	1	15,000,000	1	40,000,000	1	42,000,000	1	**42,000,000**
3	**25**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Kg**	**1,481,875**	**1,869,296**	**1,235,950,000**	**1,897,336**	**1,307,747,500**	**1,925,796**	**1,372,634,875**	**1,925,796**	**3,916,332,375**
3	**25**	**03**	**2.02**			**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi**	**Kelompok**		**5**	**590,000,000**	**5**	**619,500,000**	**5**	**650,475,000**	**5**	**650,475,000**
3	**25**	**03**	**2.02**	**01**		**Pengembangan Kapasitas pembudidaya ikan kecil**					**590,000,000**		**619,500,000**		**650,475,000**		**650,475,000**
						Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah pembudidaya yang dibina dan menerima sarana prasarana perikanan budidaya	Kelompok	12	5	235,000,000	5	246,750,000	5	259,087,500	5	**259,087,500**
						Hibah kelompok tani			-		355,000,000	-	372,750,000	-	391,387,500	-	**391,387,500**
3	**25**	**03**	**2.04**			**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah sarana prasarana**	**unit**	**2**	**3**	**645,950,000**	**3**	**688,247,500**	**3**	**722,159,875**	**3**	**722,159,875**
3	**25**	**03**	**2.04**	**01**		**Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan**					**-**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**
						Inventarisasi data produksi perikanan	Data produksi perikanan budidaya	dokumen	-	1	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	**10,000,000**
3	**25**	**03**	**2.04**	**03**		**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah produksi benih ikan**	**ekor**	**42,199,350**	**40,252,540**	**645,950,000**	**40,655,065**	**678,247,500**	**41,061,616**	**712,159,875**	**41,061,616**	**712,159,875**
						Revitalisasi Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana unit perbenihan dan pembudidaya ikan skala kecil yang tersedia	unit	-	1	615,950,000	1	646,747,500	1	679,084,875	1	**679,084,875**
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah sarana dan prasarana BBI yang tersedia	unit	2	2	30,000,000	2	31,500,000	2	33,075,000	2	**33,075,000**
																	-
3	**25**	**06**				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Prosentase produk perikanan yang dipromosikan**	**%**	**45**	**30**	**25,000,000**	**40**	**26,250,000**	**50**	**27,562,500**	**50**	**27,562,500**
3	**25**	**06**	**2.02**			**Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	**Jumlah pengolah hasil perikanan yang dibina**	**UPI**	15	15	**25,000,000**	20	**26,250,000**	25	**27,562,500**	25	**27,562,500**
3	25	06	2.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standart pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah pengolah hasil perikanan yang dibina	UPI	15	15	25,000,000	20	26,250,000	25	27,562,500	25	**27,562,500**

3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**23,624,500,000**		**13,639,205,000**		**13,884,665,250**		
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**15,684,500,000**		**4,212,205,000**		**4,422,815,250**		
							Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang memenuhi ketentuan (Memenuhi syarat dan ketentuan)	**%**	**7500 Ha (100%)**	**7500 Ha (100%)**		**7550 Ha (100%)**		**7600 Ha (100%)**		**7600 Ha (100%)**	
							Jumlah jenis sarana pertanian tanaman pangan yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana pertanian tanaman pangan yang beredar dimasyarakat x 100%	%	**61**	**64**	**15,684,500,000**	**67**	**4,212,205,000**	**69**	**4,422,815,250**	**69**	
							Jumlah jenis sarana perkebunan yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana perkebunan yang beredar dimasyarakat x 100%	%	**52**	**59**	**540,000,000**	**63**	**1,000,000,000**	**67**	**1,200,000,000**	**67**	**2,740,000,000**
							Jumlah jenis sarana pertanian hortikultura yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana pertanian hortikultura yang beredar dimasyarakat x 100%	%	**42**	**45**		**48**		**50**		**50**	
							Populasi ternak unggulan										

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Sapi	ekor	**66,553**	**66,712**		**67,379**		**68,052**		**68,052**	
							Kambing/Domba	ekor	**144,923**	**146,372**		**147,835**		**149,313**		**149,313**	
							Ayam	ekor	**9,782,451**	**10,623,822**		**10,921,289**		**11,238,066**		**11,238,066**	
							Kelinci	ekor	**13,424**	**13,558**		**13,694**		**13,831**		**13,831**	
3	**27**	**02**	**2.01**			**PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN**					**1,947,000,000**		**3,218,600,000**		**3,379,530,000**		**3,379,530,000**
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertanian	kelompok tani	705	720	157,000,000	734	164,850,000	749	173,092,500	749	173,092,500
						Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah kecamatan dalam pengawasan pupuk bersubsidi	kecamatan	17	17	15,000,000	17	15,750,000	17	16,537,500	17	16,537,500
						Operasional Alsintan	Jumlah pelatihan dan operasional alsintan	kali	2	2	12,000,000	4	12,600,000	6	13,230,000	6	13,230,000
						Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Alat mesin pertanian	jenis	4	4	130,000,000	5	136,500,000	5	143,325,000	5	143,325,000
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang didampingi penggunaan sarana pertanian				1,790,000,000		3,053,750,000		3,206,437,500		3,206,437,500
						Verifikasi dan monitoring pengelolaan belanja hibah bidang peternakan	Jumlah kecamatan yang terverifikasi dan termonitoring pengelolaan belanja hibah bidang peternakan	kecamatan		17	20,000,000		21,000,000		22,050,000		22,050,000
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah bidang pertanian	Jumlah kelompok yang dilakukan Monitoring dan evaluasi belanja hibah bidang pertanian	kelompok tani	29	30	10,000,000	30	10,500,000	30	11,025,000	119	11,025,000
						Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kelompok tani yang menerapkan pertanian organik	kelompok tani		1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	3	16,537,500
						Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat pelatihan penanganan pasca panen	kelompok		2	-	2	125,000,000	2	131,250,000	6	131,250,000
						Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi hasil pertanian	event	3	4	30,000,000	4	31,500,000	4	33,075,000	15	33,075,000
						Pemberdayaan Balai Benih	Jumlah balai benih dibina			5	-	9	125,000,000	9	131,250,000	23	131,250,000
						Penerapan Budidaya Tembakau Sesuai GAP	Luas lahan tembakau yang menerapkan GAP	Ha	25	20	-	25	750,000,000	25	787,500,000	25	787,500,000
						Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau	Persentase jumlah kelompok tani yang dibina dalam penangnan pasca panen	kelompok	7.5	15	-	20	150,000,000	25	157,500,000	25	157,500,000
						Penerapan Inovasi Teknis	Jenis inovasi yang diterapkan	Jenis inovasi teknis yang diterapkan	2	2	-	3	500,000,000	3	525,000,000	3	525,000,000
						Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Bibit/ Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit bersertifikat yang diserahkan kepada masyarakat	komoditas	0	1	-	2	200,000,000	3	210,000,000	3	210,000,000
						Pengembangan tanaman perkebunan	Jumlah komoditas perkebunan yang dikembangkan	komoditas	0	0	-	2	150,000,000	3	157,500,000	3	157,500,000
						Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pelatihan penanganan pasca panen, komoditas perkebunan	kali	1	0	-	2	150,000,000	2	157,500,000	2	157,500,000
						Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu	Luas lahan yang terkelola	Ha	0	0	-	10	100,000,000	10	105,000,000	10	105,000,000
						Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Kopi	Jumlah kampung kopi	kampung kopi	1	0	-	1	150,000,000	1	157,500,000	1	157,500,000
						Pengelolaan Alat Mesin Perkebunan	Jumlah kecamatan yang mengelola alat mesin perkebunan	kecamatan	6	6	-	6	50,000,000	6	52,500,000	6	52,500,000
						Peningkatan kualitas bahan baku dan pemberdayaan pekebun tembakau					500,000,000		525,000,000		551,250,000		551,250,000
						Hibah kelompok tani					1,215,000,000						
3	**27**	**02**	**2.02**			**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah SDG yang dikelola (peternakan, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan)**				**13,737,500,000**		**993,605,000**		**1,043,285,250**		**1,043,285,250**
3	27	02	2.02	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		s			500,000,000		972,500,000		1,021,125,000		1,021,125,000
						Pelaksanaan dan Pengembangan Inseminasi Buatan	Jumlah sarana inseminasi buatan yang disediakan	jenis		4	400,000,000	4	420,000,000	4	441,000,000	4	441,000,000
						Pengembangan Komoditas Agro Unggulan	Jumlah Kawasan buah-buahan, jumlah komoditas yang dikembangkan	komoditas (durian, alpukat, pisang cavendis)	2	3	25,000,000	3	26,250,000	3	27,562,500	3	27,562,500
						Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah wilayah pendampingan dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan.	kecamatan	-	17	-	17	250,000,000	17	262,500,000	17	262,500,000
						Pengembangan Komoditas Hortikultura	Terwujudnya kawasan hortikultura	komoditas (anggrek, krisan)	-	2	-	2	250,000,000	2	262,500,000	2	262,500,000
						Pengembangan Komoditas Biofarmaka	Terselenggaranya budidaya komoditas biofarmaka	komoditas	1	2	25,000,000	2	26,250,000	2	27,562,500	2	27,562,500
						Peningkatan kapasitas inseminator					50,000,000				-		
3	27	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG yang dimanfaatkan oleh masyarakat	SDG		2	13,237,500,000		21,105,000		22,160,250		22,160,250
						Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok pembudidaya ternak	kelompok	416	150	5,100,000	150	5,355,000	150	5,622,750	150	5,622,750
						Pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan	Jumlah pemberdayaan usaha peternakan	kegiatan	2	1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	1	16,537,500
						Hibah kelompok ternak					13,217,400,000						

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3	**27**	**02**	**2.06**			**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah**				**-**						
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
3	27	02	2.06	02		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain											
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik**		**100%**	**100%**	**7,320,000,000**	**100%**	**8,516,000,000**	**100%**	**8,505,300,000**	**100%**	**24,261,300,000**
3	**27**	**03**	**2.01**			**PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan**				**-**		**80,000,000**		**120,000,000**		**120,000,000**
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pertanian	kali	2	2	0	3	80,000,000	3	120,000,000	10	120,000,000
3	**27**	**03**	**2.02**			**PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik**	**unit**	**40**	**52**	**7,320,000,000**	**55**	**8,436,000,000**	**60**	**8,385,300,000**	**207**	**24,141,300,000**
3	*27*	*03*	*2.02*	*01*		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	***Jumlah talud irigasi terbangun***	***unit***	1	1	-	4	200,000,000	4	210,000,000	5	410,000,000
						Pengelolaan Sistem Irigasi	Jumlah infrastruktur irigasi yang terehab, terpelihara dan dibangun.	unit	2	2	-	4	320,000,000	6	336,000,000	6	656,000,000
3	*27*	*03*	*2.02*	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	unit	4	4	1,060,000,000	6	1,113,000,000	6	1,168,650,000	6	3,341,650,000
3	*27*	*03*	*2.02*	04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun	unit	0	1	120,000,000	4	126,000,000	4	132,300,000	4	378,300,000
3	*27*	*03*	*2.02*	06		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun	unit	0	10	350,000,000	10	367,500,000	10	385,875,000	10	1,103,375,000
3	27	03	2.02	07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terpelihara	RPH			-	1	100,000,000	1	105,000,000	1	205,000,000
3	*27*	*03*	*2.02*	08		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang direhab	unit	0	6	1,100,000,000	4	1,155,000,000	4	1,212,750,000	4	3,467,750,000
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					4,690,000,000		5,374,500,000		5,170,725,000		15,235,225,000
						Pemeliharaan PUSKESWAN	Rehabilitasi PUSKESWAN	unit		32	-	29	450,000,000	25		4	450,000,000
						Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Jumlah irigasi air tanah dalam yang dibangun	unit	23	32	4,690,000,000	25	4,924,500,000	25	5,170,725,000	25	14,785,225,000
3	**27**	**04**				**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka kesakitan ternak besar (%)**		**5.57**	**10.00**	**50,000,000**	**9.00**	**62,500,000**	**8.00**	**65,625,000**	**8.00**	
							Angka kesakitan ternak kecil (%)		**10.78**	**18.40**		**17.40**		**16.40**		**16.40**	
							Angka kesakitan unggas (%)		**10.50**	**19.00**		**17.00**		**15.00**		**15.00**	
3	**27**	**04**	**2.01**			**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kasus zoonosis**				**40,000,000**		**42,000,000**		**44,100,000**		**44,100,000**
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					40,000,000		42,000,000		44,100,000		44,100,000
						Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah kecamatan yang terlayani pelayanan kesehatan hewan	kecamatan	3	2	15,000,000	2	15,750,000	2	16,537,500	6	16,537,500
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	kasus	190	185	25,000,000	180	26,250,000	175	27,562,500	175	27,562,500
3	***27***	***04***	***2.04***			***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***Jumlah produk peternakan ASUH***	***jenis***	2	2	***10,000,000***	2	***20,500,000***	2	***21,525,000***	6	***21,525,000***
3	*27*	*04*	*2.04*	02		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh, halal)	kegiatan	3	3	10,000,000	3	10,500,000	3	11,025,000	9	11,025,000
3	27	04	2.04	04		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	kali	0	5	-	5	10,000,000	5	10,500,000	15	10,500,000
3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian yang tertangani**			**100%**	**75,000,000**	**100%**	**78,750,000**	**100%**	**82,687,500**	**100%**	**82,687,500**
3	**27**	**05**	**2.01**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**	**Luas lahan pertanian yang dikendalikan**				**75,000,000**		**78,750,000**		**82,687,500**		**82,687,500**
3	**27**	**05**	**2.01**	**01**		**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)**	**pengendalian OPT**			**3 OPT**	**75,000,000**	**3 OPT**	**78,750,000**	**3 OPT**	**82,687,500**	**3 OPT**	**82,687,500**
						Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah wilayah OPT terkendali	kecamatan	17	17	25,000,000	17	26,250,000	17	27,562,500	17	27,562,500
						Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dilibatkan dalam pengendalian hama penyakit	kelompok	5	1	40,000,000	4	42,000,000	4	44,100,000	4	44,100,000
						Monev pengamatan, pengendalian, dan penanggulangan bencana pertanian					10,000,000		10,500,000		11,025,000		11,025,000
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan kelompok tani yang aktif**		**705**	**720**	**495,000,000**	**734**	**769,750,000**	**749**	**808,237,500**	**749**	**808,237,500**
3	**27**	**07**	**2.01**			**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang dibina**				**495,000,000**		**769,750,000**		**808,237,500**		**808,237,500**
3	27	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah lembaga penyuluha yang meningkat kapasitasnya	bpp	17	17	245,750,000	17	258,037,500	17	270,939,375	17	270,939,375
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	kelompok	20	20	75,000,000	20	78,750,000	20	82,687,500	20	82,687,500

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3	27	07	2.01	03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana prasarana penyuluhan yang tersedia	bpp	17	17	174,250,000	17	182,962,500	17	192,110,625	17	192,110,625
3	27	07	2.01	05		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang terbentuk	bpp	17	17	-	17	250,000,000	17	262,500,000	17	262,500,000
						Non Urusan					**21,047,653,000**		**35,690,035,650**		**23,716,287,433**		**37,763,490,626**
X	**XX**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**%**		**100**	**21,047,653,000**	**100**	**35,690,035,650**	**100**	**23,716,287,433**	**100**	**37,763,490,626**
X	**XX**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas**	**%**		**100**	**100,000,000**	**100**	**105,000,000**	**100**	**110,250,000**	**100**	**110,250,000**
X	XX	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen		1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000	1	33,075,000
X	XX	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	dokumen		2	10,000,000	2	10,500,000	2	11,025,000	2	11,025,000
X	XX	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun			1	-	1	-	1	-	1	-
X	XX	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	dokumen		1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000
X	XX	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	dokumen		1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000
X	XX	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	dokumen		1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000
X	XX	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	dokumen		1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000	1	33,075,000
X	**XX**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**		**100**	**18,208,402,000**	**100**	**19,268,822,100**	**100**	**20,278,763,205**	**100**	**20,278,763,205**
X	XX	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	tahun		1	18,193,402,000		19,103,072,100		20,058,225,705		20,058,225,705
X	XX	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan		12	-	12	100,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000
X	XX	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	dokumen		1	-	1	20,000,000	1	22,500,000	1	22,500,000
X	XX	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen		1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	1	16,537,500
X	XX	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun			1	-	1	10,000,000	1	10,500,000	1	10,500,000
X	XX	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen		1	-	1	10,000,000	1	10,500,000	1	10,500,000
X	XX	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		1	-	1	10,000,000	1	10,500,000	1	10,500,000
X	**XX**	**01**	**2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik**	**%**			**10,000,000**		**35,500,000**		**37,275,000**		**37,275,000**
X	XX	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen		1	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000
X	XX	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	unit		1	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000
X	XX	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD dilakukan penilaian	unit		1	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000
X	XX	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	unit		1	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000
X	XX	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	unit		1	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000
X	XX	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen		1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000
X	XX	01	2.03	07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	unit			-		-		-		-
X	**XX**	**01**	**2.04**			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah**	**rupiah**			**25,000,000**		**36,250,000**		**38,062,500**		**38,062,500**

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2.04	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen			-						
X	XX	01	2.04	02		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, dan dokumen Kebijakan Retribusi Daerah yang tersusun	dokumen		1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	1	16,537,500
X	XX	01	2.04	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang			-		-		-		-
X	XX	01	2.04	04		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen data dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	dokumen		1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	1	5,512,500
						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					-		-		-		-
X	XX	01	2.04	05		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengolahan data Retribusi Daerah yang tersusun	dokumen		1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	1	5,512,500
						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					-		-		-		-
X	XX	01	2.04	06		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah yang tersusun	dokumen			-	1	5,000,000		5,250,000	1	5,250,000
						(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)					-		-		-		-
X	XX	01	2.04	07		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen			-	1	5,000,000		5,250,000	1	5,250,000
X	**XX**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu**	**%**			**250,000,000**		**362,500,000**		**380,625,000**		**380,625,000**
X	XX	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel			-	300	30,000,000	300	31,500,000	300	31,500,000
X	XX	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	dokumen			-	1	20,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000
X	XX	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik	aplikasi			-	3	20,000,000	3	21,000,000	3	21,000,000
X	XX	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen			-	1	10,000,000	1	10,500,000	1	10,500,000
X	XX	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang			-	20	20,000,000	20	21,000,000	20	21,000,000
X	XX	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali		8	250,000,000	8	262,500,000	8	275,625,000	8	275,625,000
X	**XX**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**			**372,022,125**		**500,623,231**		**525,654,393**		**525,654,393**
X	XX	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	item		12	5,020,000	12	5,271,000	12	5,534,550		5,534,550
X	XX	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	item			-	10	90,000,000	10	94,500,000	10	94,500,000
X	XX	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	item		5	20,000,000	5	21,000,000	5	22,050,000		22,050,000
X	XX	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket			-	1	20,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000
X	XX	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis		9	54,375,000	9	57,093,750	9	59,948,438		59,948,438
X	XX	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	bulan		12	1,980,000	12	2,079,000	12	2,182,950		2,182,950
X	XX	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	orang		240	5,100,000	240	5,355,000	240	5,622,750		5,622,750
X	XX	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		12	270,547,125	12	284,074,481	12	298,278,205		298,278,205
X	XX	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	kegiatan		12	15,000,000	12	15,750,000	12	16,537,500		16,537,500
X	**XX**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**%**			**415,708,875**		**13,631,494,319**		**508,319,035**		**14,555,522,228**
X	XX	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit		1	400,000,000	1	420,000,000	1	441,000,000	3	1,261,000,000
X	XX	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit			-		-		-		-
X	XX	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	jenis		3	15,708,875	3	16,494,319	3	17,319,035		49,522,228

PEMUTAHIRAN							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	2020	2021		2022		2023		Target Akhir RPJMD	
Ur	BU	Pr	Kg	SK	AK TV	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	2.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit			-		-		-		-
X	XX	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit			-	1	13,150,000,000			1	13,150,000,000
X	XX	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit			-	5	45,000,000	5	50,000,000	10	95,000,000
X	**XX**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**			**1,471,500,000**		**1,545,075,000**		**1,622,328,750**		**1,622,328,750**
X	XX	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	12	1,920,000	12	2,016,000	12	2,116,800	12	2,116,800
X	XX	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	193,000,000	12	202,650,000	12	212,782,500	12	212,782,500
X	XX	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	10	1,276,580,000	12	1,340,409,000	12	1,407,429,450	12	1,407,429,450
X	**XX**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**%**			**195,020,000**		**204,771,000**		**215,009,550**		**215,009,550**
X	XX	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	unit		17	150,000,000	18	157,500,000	18	165,375,000	18	165,375,000
X	XX	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	unit			-		-		-		-
X	XX	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	jenis		8	15,020,000	8	15,771,000	8	16,559,550	8	16,559,550
X	XX	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit		4	30,000,000	4	31,500,000	4	33,075,000	4	33,075,000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kokoh dengan sasaran Meningkatnya produktivitas di Bidang Industri Pertanian Pariwisata dan Meningkatnya swasembada untuk ketahanan pangan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian			Target Kinerja			Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	13,51	12,90	13,26	13,51	13,52	13,53	13,53
2	Pola Pangan Harapan	skor	84,3	85,3	83,1	87,8	88,3	89,3	89,3
3	Produksi Tanaman Pangan	ton	472.841	473.937	474.870	475.809	476.791	477.849	477.849
4	Produktivitas pertanian tanaman pangan	Kw/Ha	65,08	60,44	60,44	61	62	37	63
5	Produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Ton/Ha	8,15	10,19	10,19	11	12	13	13
6	Produktivitas pertanian perkebunan	Ton/Ha	0,58	0,61	0,61	0,64	0,67	0,70	0,70
7	Produksi daging	kg	7.721.978	8.065.887	7.772.525	5.646.121	5.928.427	6.224.848	6.224.848
8	Produksi telur	kg	22.913.394	23.269.510	22.762.730	16.288.657	17.103.090	17.958.244	17.958.244
9	Produksi susu	liter	288.764	266.826	221.256	222.362	223.473	224.590	224.590
10	Ketersediaan pangan utama	kg	484.345	441.069	490.522	491.854	492.311	493.858	493.858
11	Produksi perikanan	kg	2.366.049	2.398.691	2.353.549	2.386.086	2.419.294	2.452.973	2.452.973
12	Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	BB	BB	BB
13	Nilai IKM	skor	B	B	B	B	B	B	B

Tabel 7.2
indikator program Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023

Program	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	% lumbung pangan aktif	%	47,82	56,52	60,87	65,22	65,22
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka konsumsi energi (ake); angka konsumsi protein (akp) dan indeks ketahanan pangan	Ake: kalori/ kapita/ tahun; akp: gram/ kapita/ tahun ; ikp: indeks	Ake: 1825kalori/ kapita/ tahun; akp: 50,8 gram/ kapita/ tahun ; ikp: 86,2	Ake: 1851,4 kalori/ kapita/ tahun; akp: 51,0 gram/ kapita/ tahun ; ikp: 86,4	Ake: 1861,0 kalori/ kapita/ tahun; akp: 51,25 gram/ kapita/tahun; ikp: 86,66	Ake: 1870,5 kalori/ kapita/ tahun; akp: 51,5 gram/ kapita/ tahun; ikp: 87,16	Ake: 1870,5 kalori/ kapita/ tahun; akp: 51,5 gram/ kapita/ tahun; ikp: 87,16
Program penanganan kerawanan pangan	Prosentase desa rawan pangan	%	29,37%	28,81%	26,55%	24,29%	24,29%
Program pengawasan keamanan pangan	Jumlah pangan segar yang diuji	Komoditas ; pasar	8 komoditas dan 4 pasar	8 komoditas dan 4 pasar	8 komoditas dan 4 pasar	8 komoditas dan 4 pasar	8 komoditas dan 4 pasar
Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Kg	511.673	516.790	521.988	527.177	527.177
Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Kg	1.841.875	1.869.296	1.897.336	1.925.796	1.925.796

Program	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	%	45	30	40	50	50
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang memenuhi ketentuan (memenuhi syarat dan ketentuan)	Ha (%)	7500 Ha (100%)	7500 Ha (100%)	7550 Ha (100%)	7600 Ha (100%)	7600 Ha (100%)
	Jumlah jenis sarana pertanian tanaman pangan yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana pertanian tanaman pangan yang beredar dimasyarakat x 100%	%	61	64	67	69	69
	Jumlah jenis sarana perkebunan yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana perkebunan yang beredar dimasyarakat x 100%	%	52	59	63	67	67

Program	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
	Jumlah jenis sarana pertanian hortikultura yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah jenis sarana pertanian hortikultura yang beredar dimasyarakat x 100%	%	42	45	48	50	50
	Populasi ternak unggulan						
	Sapi	Ekor	65.829	66.712	67.446	68.255	68.255
	Kambing/domba	Ekor	143.231	149.327	150.521	151.876	151.876
	Ayam	Ekor	7.959.490	10.623.822	10.921.289	11.238.066	11.238.066
	Kelinci	Ekor	13.330	13.017	13.187	13.371	13.371
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	Unit (%)	40 unit (100%)	52 unit (100%)	55 unit (100%)	60 unit (100%)	207 unit (100%)
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Angka kesakitan ternak besar (%)	%	5,57	10,00	9,00	8,00	8,00
	Angka kesakitan ternak kecil (%)	%	10,78	18,40	17,40	16,40	16,40
	Angka kesakitan unggas (%)	%	10,50	19,00	17,00	15,00	15,00

Program	Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
Program penyuluhan pertanian	Cakupan kelompok tani yang aktif	Kelompok Tani	705	720	734	749	749
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai sop	%	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

8.1 Program Transisi

Periode Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Bupati Karanganyar

JULIYATMONO